

Mengakselerasi Politik Perempuan Di Parlemen: Dari Hulu Hingga Hilirisasi

Ranto Ranto¹, Ariandi A Zulkarnain²

^{1,2} Department Political Science, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

¹ rantopalempat@gmail.com, ² ariandi@ubb.ac.id

Abstract

This study aims to prove the phenomenon of women's half-hearted political affirmation practices carried out by political parties at the local level. With qualitative research methods that take loci in Bangka Belitung, this study captures how gender inequality in the composition of leaders in legislative institutions. The results of this study show that female politicians who are elected as legislators in their regions have no chance of occupying strategic political offices. The experience from Bangka Belitung reported the positive side of women's success in competing while leaving some critical notes. First, women's involvement in politics is practically no longer a candidate who only fulfills women's quota. Second, the results of the 2019 Legislative Election must be a momentum in providing space for women who are elected to occupy top positions in political positions in the regional legislative arena. Therefore, the discussion on fulfilling the quota of 30% women's representation is not limited to candidacy but also guarantees women's affirmation in the composition of leaders in the legislature.

Keywords: Female Politician, Election, Partisipation, afirmastion

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan fenomena praktik afirmasi politik perempuan yang setengah hati dilakukan oleh partai politik di tingkat lokal. Dengan metode penelitian kualitatif yang mengambil lokus di Bangka Belitung, penelitian ini memotret bagaimana ketimpangan gender dalam komposisi pimpinan di lembaga legislatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa politisi perempuan yang terpilih sebagai anggota legislator di daerahnya tidak memiliki peluang dalam menduduki jabatan politik strategis. Pengalaman dari Bangka Belitung mengabarkan sisi positif dari keberhasilan perempuan dalam berkompetisi sekaligus menyisakan beberapa catatan kritis. Pertama, keterlibatan perempuan dalam dunia politik praktis tidak lagi menjadi kandidat yang hanya memenuhi quota perempuan saja. Kedua, hasil Pemilu Legislatif 2019 harus menjadi momentum dalam memberikan ruang bagi perempuan yang terpilih untuk menduduki posisi puncak jabatan politik di arena legislatif daerah. Oleh karenanya, diskusi mengenai pemenuhan quota 30% keterwakilan perempuan tidak sebatas pencalonan saja akan tetapi sekaligus menjamin afirmasi perempuan dalam komposisi pimpinan di lembaga legislatif.

Kata Kunci : Politisi Perempuan, Pemilu, Partisipasi, Afirmasi

Pendahuluan

Diskusi eksistensi perempuan dalam arena politik di Indonesia kekinian secara umum memberikan catatan positif sekaligus negatif. Misalnya dengan mencermati hasil Pemilu Legislatif 2019 yang lalu, posisi perempuan masih belum terwakilkan jika dilihat dari tingkat keterpilihannya dalam menduduki jabatan politik di parlemen nasional. Selama ini, keterlibatan perempuan di arena politik begitu diyakini sebagai pelengkap sandiwara dari kegagalan partai politik dalam melakukan kaderisasi politik dikelompok perempuan.

Meskipun demikian, seiring perjalanan dari pemilu ke pemilu, tren peningkatan partisipasi perempuan dalam arena politik yang ikut berkompetisi semakin membaik. Ada beberapa kesimpulan yang dapat menjelaskan fenomena tersebut seperti yang disampaikan oleh Muhtadi¹ berikut ini: pertama, jika dilihat dari *supply side* ada peningkatan partisipasi perempuan di satu sisi, dan ada penurunan partisipasi politik di

kelompok laki-laki. Tentu saja kondisi ini merupakan kabar baik karena memberi peluang yang lebih terbuka bagi perempuan untuk menduduki jabatan politik.

Kedua, meningkatnya angka partisipasi politik perempuan dari beberapa pemilu legislatif yang sudah berlangsung tidak sejalan dengan keterpilihan politisi perempuan sebagai anggota legislator di berbagai arena yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan politisi laki-laki. Menurut Muhtadi, rendahnya keterpilihan politisi perempuan tersebut disebabkan oleh kecenderungan pemilih di Indonesia yang masih mendiskriminasikan politisi perempuan. Bahkan, walaupun ada politisi perempuan yang berhasil menduduki jabatan politik tersebut banyak pihak meyakini bahwa karena faktor kedekatan dan berada dalam lingkaran keluarga elit-elit politik yang memang sudah mapan. Selain itu, kedekatan dengan elit politik secara struktural—yang menempatkan caleg perempuan di nomer urut strategis—juga masih dipercaya memberikan peluang yang besar bagi terpilihnya politisi perempuan tersebut. Bagi politisi perempuan yang tidak memiliki

¹ Dalam sebuah kegiatan Diskusi dan launching Buku Hak Politik Perempuan: Riu dalam Angka, Senyap Dalam Hak yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2019 dalam presentasinya yang bertemakan Perempuan dan Politik.

akses dan jaringan politik yang kuat di lingkaran elit politik menjadi sebuah pekerjaan ekstra untuk memenangkan kompetisi politik.

Benarkah demikian? Terpilihnya beberapa politisi perempuan yang tersebar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Propinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti Me Hoa, Vina Crystin Ferani (Vina), Feni Crista, Suyenti, Endang Kristiani, Tjindrajana misalnya memberikan warna yang baru dalam menjelaskan politik perempuan di Indonesia. Bahkan sejumlah nama yang disebutkan tadi merupakan politisi perempuan dari kalangan etnis tionghoa, yang jika dilihat dari dukungan pemilih tradisional berbasis etnisitas merupakan kelompok yang minoritas di Bangka Belitung.²

² Untuk menjelaskan mengapa politisi tionghoa di pilih oleh pemilih melayu memang disebabkan terjadinya proses asimilasi budaya yang cukup panjang di Bangka Belitung. Bahkan Idi (2009) menyebutkan bahwa proses asimilasi etnis melayu dan etnis tionghoa di Bangka terjadi di semua lapisan, mulai dari social, budaya hingga politik. Berikutnya, Heidues (1992) dengan tegas menyebutkan bahwa semua perempuan tionghoa yang ada di Bangka saat ini merupakan keturunan dari Melayu. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia di tahun 2007 menemukan fenomena bahwa pemilih melayu tidak keberatan untuk mendukung politisi tionghoa menjelang Pemilihan Gubernur Bangka Belitung yang ketika itu Basuki Tjahja Purnama (Ahok) mencalonkan diri menjadi Gubernur Bangka Belitung.

Berdasarkan potret kekinian dalam melihat fenomena politisi perempuan, tulisan ini bermaksud untuk menunjukkan beberapa hal. Pertama, ingin mengabarkan bahwa kehadiran politisi perempuan dalam memperebutkan jabatan politik di Bangka Belitung cukup mengejutkan bagi politisi laki-laki. Bahkan perolehan suara politisi perempuan tionghoa seperti Me Hoa, misalnya berhasil melampaui perolehan suara politisi laki-laki berlatarbelakang etnis melayu di daerah pemilihannya.

Jika dibandingkan dengan perolehan suara masing-masing politisi yang berhasil menduduki jabatan politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dari hasil Pemilu Legislatif 2019 yang lalu, Me Hoa mendapatkan dukungan publik paling banyak. Begitu juga dengan Vina yang memperoleh suara tertinggi di seluruh Kabupaten Belitung dengan menggungguli politisi laki-laki.

Selain Me Hoa, Vina yang telah disebutkan tadi, politisi perempuan lainnya seperti Liana Tirta Anda Lusua juga terpilih meskipun bukan politisi yang dijagokan oleh elit-elit partai politik karena berada di nomer urut 5.

Walau masih terbatas pada konteks lokalitas, keberhasilan sejumlah politisi perempuan dalam memenangkan dukungan publik di Bangka Belitung seakan ingin menegaskan bahwa keberadaan perempuan dalam memasuki ruang-ruang politik sudah semakin siap dari waktu ke waktu.

Sayangnya, dari cerita-cerita keberhasilan perempuan dalam menduduki jabatan politik seperti yang telah disebutkan tadi, tidak diikuti oleh adanya kepastian hukum bagi politisi perempuan yang terpilih sebagai wujud konkrit untuk menjamin afirmasi perempuan dalam komposisi pimpinan di lembaga legislatif. Selama ini, perempuan hanya diposisikan dalam jabatan-jabatan politik yang kurang strategis ketika berada dalam parlemen.

Padahal, jika dilihat dari dukungan publik yang didapatkan, keberadaan politisi perempuan cukup kompetitif. Faktanya, ketika sudah terpilih dan menjadi anggota legislator, perempuan masih terbentur oleh tembok pembatas dalam menjalankan fungsinya secara maksimal. Adanya tembok pembatas tadi otomatis akan mengurangi ruang gerak politisi perempuan untuk terlibat dalam arena

politik ketika merumuskan sebuah kebijakan bagi publik. Akibatnya sudah bisa ditebak. Keterwakilan perempuan dalam memperjuangkan aspirasinya masih dirasakan antara ada dan tiada. Oleh karenanya, diskusi mengenai pemenuhan quota 30% keterwakilan perempuan kiranya tidak berhenti hanya pemberlakuan afirmasi pada saat pencalonan saja (hulu) akan tetapi diharapkan sampai pada titik hilirisasi (ada produk hukum yang menjamin afirmasi perempuan dalam komposisi pimpinan di lembaga legislatif).

Metode

Penelitian ini merupakan studi tentang perempuan dan politik yang cenderung fokus pada usaha eksplorasi deskriptif tentang potret partisipasi politik perempuan di Bangka Belitung pada Pemilu Legislatif 2019 baik secara aktivitas maupun ruang kelembagaan partai politik yang lalu maka metode yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif karena melalui metode ini mampu memberikan pemahaman yang “mendalam” bukan “luas” untuk mengeksplorasi fenomena yang diteliti (Blaxter *et al.*, 1996). Adapun pengumpulan datanya melalui teknik wawancara yang mendalam dengan

mewawancarai politisi perempuan, elit partai politik yang memegang jabatan struktural serta aktivis kelompok perempuan yang bergiat dalam isu yang sama. Selain wawancara, pengayaan analisis data juga dilakukan dengan cara menelusuri berbagai dokumen hasil penelitian yang relevan dengan tema penelitian ini.

Untuk memulai diskusi ini, pengalaman dari Bangka Belitung kiranya bisa dijadikan sebagai *pilot project* dalam mengakselerasi politik perempuan untuk komposisi pimpinan di parlemen lokal. Ada beberapa alasan mengapa Bangka Belitung dianggap bisa menjadi contoh yang cukup memadai. Pertama, jika dilihat dari perolehan suara politisi perempuan dari hasil Pemilu Legislatif 2019 yang lalu, pemilih di Bangka Belitung sudah tidak mendiskreditkan politisi perempuan. Artinya tidak ada diskriminasi pemilih terhadap politisi perempuan. Bahkan politisi perempuan dari kalangan minoritas sekalipun mendapatkan dukungan luas dari masyarakat. Kedua, beberapa politisi perempuan jika dilihat dari produktifitasnya dalam memperjuangkan aspirasi politik konstituennya cukup bisa diandalkan.

Keraguan elit-elit politik yang didominasi oleh kelompok maskulin terhadap kemampuan politisi perempuan dalam mengemban amanah pucuk pimpinan parlemen sebenarnya sudah terjawab dari kinerja yang telah dilakukan selama berkiprah sebagai anggota legislator. Ketiga, peluang untuk menempatkan politisi perempuan dalam menduduki jabatan ketua parlemen dimiliki oleh beberapa partai politik yang menjadi pemenang pemilu di sebuah kabupaten. Jika elit politik—partai politik—memiliki komitmen untuk mengurangi ketimpangan gender sekaligus mendorong peningkatan keterlibatan perempuan dalam politik saat ini merupakan waktu yang tepat. Disinilah tulisan ini menjadi relevan untuk didiskusikan sebagai upaya memastikan afirmasi perempuan dalam kepemimpinan parlemen di masa mendatang.

Geliat Politisi Perempuan Di Bangka Belitung: Dari Melayu Hingga Tionghoa

Seperti biasa, di hari Minggu menjelang siang, Me Hoa atau yang akrab di sapa Ce Yin bergegas pulang setelah melakukan rutinitas ibadahnya di sebuah gereja katolik yang ada di

Bangka Belitung. Perempuan yang merupakan keturunan dari etnis tionghoa ini tercatat sebagai salah seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Politisi yang dibesarkan oleh Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia kembali menduduki jabatan politik di daerahnya setelah terpilih dan mendapat angka dukungan publik cukup meyakinkan. Bahkan Me Hoa terpilih dengan suara terbanyak dengan angka 2.885 (Bangkapos, 8/5/2019).

Diluar kesibukannya dalam mengartikulasikan kepentingan dan aspirasi politik yang disuarakan oleh konstituen, Me Hoa juga aktif dalam organisasi Pemuda Katolik Komisariat Daerah Provinsi Bangka Belitung.³ Begitulah Me Hoa dalam kesehariannya yang penuh semangat dan energik jika dibandingkan dengan kebanyakan perempuan tionghoa lainnya yang ada di Bangka Belitung. Bahkan Me Hoa selama dua periode dipercaya oleh partainya untuk memegang jabatan Ketua Komisi I di Periode 2009-2014 di Bidang Pemerintahan dan Sosial, dan

Ketua Komisi I di Bidang Ekonomi dan Keuangan pada periode 2014-2019.⁴

Di daerah tetangga Me Hoa juga ada sejumlah nama seperti Suyenti, Trisnawatai⁵, Rossa Gustina⁶, Maria⁷ yang sedang mencoba peruntungannya di Pemilu Legislatif 2019 untuk menduduki jabatan politik. Kalau Me Hoa dan Suyenti tadi memiliki pengalaman yang cukup di dunia politik praktis secara langsung—karena sebagai politisi berstatus *incumbent*—beberapa nama perempuan tionghoa ini masih perlu menguji kemampuan diri sendiri untuk menaklukkan berbagai peluang dan hambatan yang ada dalam setiap tangga arena politik yang akan dinaikinya. “*Lain ladang lain pula belalang*” merupakan sebuah pepatah klasik yang bisa dipinjamkan untuk melihat bagaimana seni perempuan-perempuan tionghoa tadi dalam memenangkan simpatik publik yang dibutuhkan untuk mengantarkan mereka dalam menduduki jabatan publik nanti.

³ Wawancara Personal pada tanggal 15 Juli 2019 di kediamannya

⁴ Wawancara Personal pada tanggal 15 Juli 2019 di kediamannya

⁵ Calon Anggota Legislatif (Caleg) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan) yang merupakan perempuan dari kalangan etnis tionghoa

⁶ Caleg dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) untuk Kota Pangkalpinang

⁷ Caleg dari Partai Perindo

Pada diskusi awal, Rosa Gustina (Rosa) mengaku sangat bergantung dengan sosok sang Papa⁸ yang akan membantu serta membimbingnya dalam memasuki dunia politik. Bahkan, jika ditelusuri latarbelakang pencalonannya karena faktor ketidak sengajaan. Menurut pengakuan Rosa, pada awalnya dia tidak memiliki niat untuk menjadi calon anggota legislatif pada Pemilu Legislatif 2019 kali ini. Hanya saja, karena ada salah seorang bakal calon anggota legislatif perempuan dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) mengundurkan diri kemudian dirinya mengambil kesempatan tersebut.⁹ Selain karena alasan tadi, Rosa juga mengaku memiliki pengalaman yang buruk dalam berurusan dengan birokrasi di daerahnya sehingga memotivasi dia untuk menduduki jabatan publik yang bertujuan agar bisa memperbaiki

birokrasi yang telah ada.¹⁰ Walaupun dibimbing langsung oleh politisi senior yang berpengalaman, sayangnya, Rosa belum berhasil meraih dukungan publik untuk mengantarkannya menjadi legislator di Kota Pangkalpinang.

Lain halnya dengan Maria. Maria berasal dari keluarga pengusaha sekaligus penguasa¹¹. Jaringan politik dan modal yang dimiliki oleh keluarga besar Maria merupakan sebuah fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk menduduki jabatan politik. Meski memiliki berbagai fasilitas tadi, Maria belum berhasil menduduki jabatan politik di parlemen Kota Pangkalpinang.

Di seberang Pulau Bangka, seorang politisi perempuan berlatarbelakang etnis tionghoa

⁸ Papa dari Rosa Gustina merupakan seorang mantan politisi yang pernah eksis di Bangka Belitung. Karena faktor usia dan lain sebagainya, akhirnya sang Papa menarik diri dari aktivitas dunia politik praktis secara langsung.

⁹ Rosa Gustina menyebutkan bahwa mundurnya salah seorang caleg perempuan dari partai nasdem karena sedang mengikuti kuliah program master (S2) jurusan Hukum di sebuah perguruan tinggi. Karena caleg perempuan sebelumnya tadi bergelar Sarjana Hukum (S.H) maka pengurus Partai Nasdem mencari sosok pengganti yang memiliki latarbelakang pendidikan dan jenis kelamin yang sama. Spesifikasi yang ditawarkan oleh Partai Nasdem tadi begitu cocok dengna latarbelakang Rosa Gustina

¹⁰ Dalam pengalamannya Rosa pernah mengurus Kartu Tanda Penduduk yang baru selesai setelah 2 tahun menunggu.

¹¹ Adik kandung laki-laki Maria yang bernama Markus saat ini sedang menjabat Bupati Kabupaten Bangka Barat periode 2016-2021. Sementara Kakaknya bernama Alexander Franciscus saat ini terpilih sebagai Senator (Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Provinsi Bangka Belitung untuk periode 2019-2024) dengan perolehan suara sejumlah 71.588 (Wow Babel, 8/5/2019). Sebelumnya pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Barat (2004-2009), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (2009-2014). Sedangkan sang adik bungsu bernama Yacob saat ini tercatat sebagai politisi Partai Demokrasi Indonsia Perjuangan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dari daerah pemilihan Kabupaten Bangka Barat mencoba peruntungannya namun gagal memenangkan kompetisi tersebut.

bernama Vina Cristyn Ferani (Vina) meraih dukungan publik dari masyarakat Kabupaten Belitung Daerah Pemilihan 2 secara gemilang dengan angka 2.487 berdasarkan berita acara Nomor 66/PL.01.9-BA/1902/KPU-Kab/VII/2019 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung (KPU Belitung). Perolehan suara Vina ini merupakan tertinggi dari seluruh peserta pemilu yang ada disemua daerah pemilihan Kabupaten Belitung. Padahal, pencalonan Vina di Pemilu Legislatif 2019 merupakan pengalaman yang pertama kalinya. Artinya, politisi perempuan pemula bisa mengalahkan perolehan suara politisi senior yang ada selama ini. Dalam sebuah pengakuannya, Vina mengatakan bahwa keterlibatan langsung di dunia politik karena ingin berperan aktif dalam meningkatkan sektor ekonomi demi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belitung (Bangkapos, 24/7/2019).

Begitu juga dengan politisi perempuan lainnya seperti Liana Tirta Andalusia (Liana) dari kalangan melayu yang terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barat daerah pemilihan 1, yakni

Kecamatan Muntok-Kecamatan Simpang Teritip dengan perolehan suara sebanyak 1.197. Mencermati motivasi pencalonan Liana ini tidak terlepas dari keprihatinannya terhadap berbagai kasus pelecehan seksual yang terjadi di wilayah Bangka Barat. Melihat realitas kekinian inilah kemudian menggugah Liana untuk menjadi legislator dikarenakan selama ini perjuangan membela hak-hak perempuan dan anak belum maksimal karena masih saja terjadi pelecehan seksual seperti yang baru saja terjadi di Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat (Radio Pilar, 21/7/2019).

Dari ilustrasi diatas, Pemilu Legislatif 2019 kali ini menegaskan beberapa hal. Pertama, terlibat langsung dalam dunia politik praktis melalui pemilu misalnya tidak saja sebagai upaya untuk memanfaatkan status kewarganegaraan yang memiliki hak dan kesempatan yang sama di arena hukum. Begitu juga dengan orientasi mencari sumber-sumber ekonomi atau memapankan sumber ekonomi yang telah ada sepertinya bukan menjadi alasan tunggal lagi dalam menjelaskan fenomena partisipasi politik etnis tionghoa dewasa ini. Sebuah

pemahaman dalam perspektif pengabdian, melayani—khususnya kelompok minoritas (etnis tionghoa)—sepertinya harus mendapatkan tempat untuk dijadikan alternatif jawaban dalam menjelaskan keterlibatan perempuan tionghoa dalam dunia politik. Adanya keinginan untuk sebagai “perwakilan” dalam menyalurkan aspirasi masyarakat tionghoa di Bangka Belitung mendapatkan pengakuan yang sama dari semua politisi berlatarbelakang tionghoa yang mencoba tampil di ruang-ruang publik.

Kedua, jika dilihat dari jumlah keikutsertaan perempuan melayu dan perempuan tionghoa di Pemilu Legislatif 2019 dari seluruh calon yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap—kemudian dikalikan dengan jumlah politisi perempuan yang terpilih—maka dapat disimpulkan bahwa tingkat keterpilihan perempuan tionghoa lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan melayu. Ada banyak faktor yang bisa menjelaskan fenomena ini. Tapi satu hal yang pasti: di Bangka Belitung diskriminasi pemilih terhadap etnis minoritas (tionghoa)—apakah terhadap politisi laki-laki maupun politisi perempuan—tidak terjadi. Ini

merupakan sebuah kabar baik dari keberhasilan proyek demokrasi di arena lokal.

Potret Komposisi Perempuan Di Parlemen Lokal

Di Bangka Belitung, keberadaan politisi perempuan tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Beberapa kali pelaksanaan Pemilu Legislatif berlangsung menunjukkan fenomena bahwa perempuan di daerah penghasil logam timah terbesar di Asia ini semakin siap untuk berkompetisi dengan politisi laki-laki. Sejumlah nama seperti Me Hoa dan Vina merupakan potret politisi perempuan etnis tionghoa yang mengalahkan perolehan politisi laki-laki di kabupatennya masing-masing di Pemilu Legislatif 2019 yang lalu.

Untuk melihat bagaimana keberhasilan politisi perempuan dalam memperebutkan jabatan politik bisa dimulai dari komposisi perempuan di parlemen lokal (kabupaten/kota) hasil Pemilu Legislatif 2014 dan Pemilu Legislatif 2019 yang ada di Bangka Belitung dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 1. Komposisi Keterwakilan Perempuan di Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Kabupaten/ Kota	Jumlah Kursi	Hasil Pemilu Legislatif 2014		Kesimpulan	Hasil Pemilu Legislatif 2019		Perubahan Komposisi 2014/2019
		Lk	Pr		Lk	Pr	
Bangka Barat ¹²	25	23 (92%)	2 (8%)	rendah	21 (84%)	4 (16%)	naik-positif
Bangka ¹³	30	25 (83)	5 (17%)	sedang	29 (82%)	6 (18%)	naik-positif
Pangkalpinang ¹⁴	30	28 (93%)	2 (7%)	rendah	27 (90%)	3 (10%)	naik-positif
Bangka Tengah ¹⁵	25	23 (88%)	3 (12%)	rendah	23 (82%)	2 (8%)	turun-negatif
Bangka Selatan ¹⁶	25	23 (88%)	2 (7%)	rendah	23 (92%)	2 (8%)	turun-negatif
Belitung ¹⁷	25	25 100%	0 (0%)	buruk	23 (82%)	2 (8%)	naik-positif
Belitung Timur ¹⁸	25	21 (84%)	4 (16%)	Sedang	20 (80%)	5 (20%)	naik-positif

Diolah dari berbagai sumber

Jika mencermati informasi yang didapatkan dari tabel 1 di atas dapat disimpulkan bahwa pasang surut keterwakilan perempuan di parlemen lokal cukup dinamis. Fakta ini begitu terlihat pada berbagai hal berikut. Pertama, Di beberapa kabupaten/kota seperti Bangka Barat, Bangka, Pangkalpinang, Belitung dan Belitung Timur mengalami perubahan yang positif, yakni adanya peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari waktu ke waktu. Hal yang lebih menggembirakan lagi terjadi di Belitung. Di periode 2014-2019 masa bakti legislator tidak ada seorangpun perwakilan politisi perempuan. Kini, untuk masa lima tahun kedepan, masyarakat di Belitung boleh berharap kepada 2 orang politisi perempuan yang terpilih dalam memperjuangkan berbagai aspirasi politiknya.

Kedua, tren penurunan keterwakilan perempuan di parlemen

lokal terjadi di Kabupaten Bangka Tengah dan Bangka Selatan. Semula—hasil Pemilu Legislatif 2014—politisi perempuan berhasil mendapatkan kursi di parlemen dengan angka 12 % atau 3 (tiga) orang dari jumlah 25 (dua puluh lima) orang. Namun, dari hasil Pemilu Legislatif 2019 yang baru saja berlalu, politisi perempuan yang berhasil memenangkan kompetisi politik dalam menduduki jabatan politisi di parlemen turun menjadi 2 (dua) orang saja dari total 25 (dua puluh lima) kursi yang disediakan. Kondisi ini tentu saja memberikan kabar kurang baik bagi kelompok-kelompok aktivis perempuan yang begitu mementingkan keterwakilan perempuan di ruang publik.

Dari pengalaman diatas, rata-rata tingkat keterpilihan politisi perempuan masih di bawah angka 30%. Hanya di Belitung Timur komposisi perempuan di parlemen lokal hasil Pemilu Legislatif 2019 cukup menggembirakan yakni mencapai angka 20% keterwakilan. Meskipun belum menembus angka maksimal, kemampuan politisi perempuan disini perlu mendapatkan apresiasi karena mampu menunjukkan kepada publik

bahwa perempuan bisa berhasil dalam berkompetisi dengan politisi laki-laki untuk menduduki jabatan politik. Keberhasilan perempuan di Belitung Timur ini diharapkan bisa memotivasi aktor-aktor politik potensial lainnya di banyak daerah untuk tetap optimis melihat keterwakilan perempuan dalam memasuki arena politik di masa mendatang.

Selanjutnya, hal yang tidak kalah penting adalah melihat bagaimana penempatan perempuan yang telah terpilih tadi dalam komposisi kepemimpinan di parlemen lokal.

Tabel 2. Komposisi Perempuan dalam Posisi Pimpinan di Parlemen Lokal Periode 2014-2019

Kabupaten/Kota	Pimpinan (Ketua dan Wakil Ketua)		Ketua Komisi		Anggota Biasa	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Bangka Barat	√	×	√	×	√	√
Bangka	√	×	√	×	√	√
Pangkalpinang	√	×	√	×	√	√
Bangka Tengah	√	×	√	√	√	√
Bangka Selatan	√	×	√	×	√	√
Belitung	√	×	√	×	√	√
Belitung Timur	√	×	√	×	√	√

Diolah dari berbagai sumber
Keterangan : √ (ada keterwakilan)
: × (tidak ada keterwakilan)

Berdasarkan komposisi pimpinan parlemen lokal yang ada di Bangka Belitung hasil Pemilu Legislatif 2014—kepemimpinan periode masa bakti 2014-2019 maka keberadaan perempuan cukup memperhatikan. Fenomena ini tidak terlepas dari kondisi lapangan bagaimana ketika terpilih sebagai legislator maka perempuan ditempatkan pada posisi sebagai

anggota biasa saja. Dari 7 kabupaten/kota yang ada, hanya di Kabupaten Bangka Tengah politisi perempuan mampu menembus tembok politik dominasi maskulinitas, yakni sebagai ketua komisi. Seperti yang telah diilustrasikan pada bagian sebelumnya, Me Hoa merupakan politisi yang mendapat posisi sebagai ketua komisi.

Sementara di Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Selatan, Kota Pangkalpinang, Kabupaten Belitung dan Kabupaten Belitung Timur tidak seorangpun politisi dari kalangan perempuan yang dipercaya untuk menduduki jabatan ketua komisi, apalagi untuk posisi sebagai ketua, wakil ketua bagaikan *panggang jauh dari api*.

Lalu, bagaimana dengan keberadaan politisi perempuan dalam kepemimpinan di berbagai alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten/Kota yang ada di Bangka Belitung? Jika dilihat dari komposisi kelengkapan alat yang ada pada parlemen lokal mulai dari Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi, dan Badan Kehormatan, posisi perempuan masih terpinggirkan.

Tabel 3. Komposisi Perempuan dalam Posisi Pimpinan Alat Kelengkapan Parlemen Periode 2014-2019

Kabupaten/Kota	Ketua Badan Musyawarah		Ketua Badan Anggaran		Ketua Badan Legislasi		Ketua Badan Kehormatan	
	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
Bangka Barat	√	x	√	x	√	√	√	x
Bangka	√	x	√	x	√	√	√	x
Pangkalpinang	√	x	√	x	√	√	√	x
Bangka Tengah	√	x	√	√	√	√	√	x
Bangka Selatan	√	x	√	x	√	√	√	x
Belitung	√	x	√	x	√	√	√	x
Belitung Timur	√	x	√	x	√	√	x	√

Diolah dari berbagai sumber

Keterangan : √ (ada keterwakilan)
: x (tidak ada keterwakilan)

Dari tabel 3, perempuan masih ditempatkan pada posisi yang tidak produktif. Bahkan, di mayoritas parlemen lokal yang ada di Bangka Belitung, hanya di Kabupaten Belitung Timur politisi perempuan dipercaya untuk menjadi ketua Badan Kehormatan. Posisi inipun tentu saja tidak memberikan peluang yang maksimal bagi seorang perempuan untuk memperjuangkan aspirasi politiknya.

Menurut catatan yang dirangkum dalam tabel 2 dan tabel 3 di atas, kepercayaan politisi laki-laki terhadap kepemimpinan politisi perempuan masih tidak terakomodir. Barangkali perlu dilakukan penelitian yang cukup mendalam untuk mengetahui alasan yang pasti mengapa perempuan sulit mendapatkan kepercayaan dalam memimpin sebuah lembaga politik di parlemen lokal. Tapi, berdasarkan informasi awal yang bisa ditelusuri

seperti yang terlihat pada bagaian berikutnya nanti, nihilnya keterwakilan perempuan dalam komposisi kepemimpinan di parlemen karena disebabkan oleh rendahnya komitmen politisi laki laki untuk memberikan ruang gerak yang leluasa bagi perempuan dalam mengaktualisasikan aspirasi politiknya. Keberadaan perempuan masih dianggap sebagai “asesoris demokrasi” yang memang diamanahkan oleh undang undang terkait dengan keterwakilan perempuan dalam politik.

Padahal, praktik tentang ketimpangan struktur dan kultur politik berbasis gender akibat dari dominasi patriarki sejak merdeka hingga saat ini masih terjadi di Indonesia. Belajar dari pengalaman ini sebenarnya tidak ada rintangan hukum formal yang menghalangi perempuan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan publik di Indonesia. Namun jumlah perempuan yang memegang jabatan-jabatan politik di parlemen masih tetap rendah. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, politisi perempuan di Bangka Belitung telah menghadapi sejumlah hambatan dalam lingkungan publik, dimana secara

politik cenderung sering dikecewakan. Oleh karenanya diskusi mengenai pentingnya politik keterwakilan perempuan di pimpinan parlemen harus dijadikan evaluasi bagi semua pihak di masa mendatang untuk mengurangi ketimpangan gender dalam kepemimpinan di berbagai arena politik.

Menyoal Komitmen Politik Afirmasi Yang Setengah Hati

Sebelum mendiskusikan aspek teknis pengakomodiran perempuan dalam jabatan pimpinan di parlemen, perlu kiranya disampaikan bagaimana komitmen elit politik terhadap kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan di parlemen selama ini. Beberapa informasi umum berikut ini mestinya bisa dijadikan sebagai pijakan untuk mengubah kemungkinan komposisi keterwakilan perempuan dalam pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah nanti.

Agar pembahasan ini lebih terarah, hal pertama yang dilakukan adalah mengetahui syarat utama untuk menjadi pimpinan di lembaga parlemen. Masing-masing institusi politik seperti partai politik tentu saja memiliki prasyarat yang beragam. Sangat

tergantung dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) di setiap partai politik. Dalam kajian kali ini, partai politik pemenang pemilu—yang paling berpotensi untuk mengutus pimpinan di parlemen—Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mendapatkan sorotan yang utama. Hal ini memang disebabkan karena PDI Perjuangan di Bangka Belitung berdasarkan hasil perolehan suara Pemilu Legislatif 2009 yang lalu menjadi pemenang di semua kabupaten/kota yang ada di provinsi berakronim “*Negeri Serumpun Sebalai*”. Berdasarkan hasil perolehan suara di Pemilu Legislatif 2019, masyarakat di Bangka Belitung memberikan dukungan penuh kepada PDI Perjuangan. Bahkan partai ini dapat mengutus kadernya untuk menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di semua kabupaten/kota yang ada di Bangka Belitung hingga provinsi.

Berdasarkan penelusuran informasi yang berhasil dikumpulkan, partai yang dipimpin oleh politisi perempuan ternama yakni Megawati Soekarnoputri memiliki catatan khusus dalam menempatkan kader-kader

politiknya untuk menjadi pimpinan parlemen—baik di level lokal maupun di level nasional. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat (Djarot) menyebutkan sejumlah kriteria khusus yang harus dipenuhi oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat di Jawa Timur yakni berikut ini: pertama, pimpinan dewan harus merupakan pengurus di PDI Perjuangan. Adapun harus tercatat sebagai pengurus partai maksudnya adalah dalam tiga jabatan strategis seperti Ketua, Sekretaris, dan Bendahara (KSB). Meskipun dalam konteks ini daerah Jawa Timur sebagai rujukan, namun secara umum, semua daerah juga memberlakukan kriteria yang sama tidak terkecuali Bangka Belitung.¹² Menurut Djarot, setiap kader yang tercatat sebagai pengurus strategis tadi akan diprioritaskan untuk menjadi pimpinan dewan di setiap daerah yang dimenangkan oleh PDI Perjuangan.

¹² Menurut kader PDI Perjuangan yang menjadi pengurus di Dewan Pimpinan Daerah Bangka Belitung juga mengaku bahwa persyaratan untuk menjadi pimpinan dewan perwakilan rakyat daerah yang ada di Bangka Belitung tidak berbeda dengan daerah lainnya. Bahkan, perolehan suara terbanyak yang diraih oleh seorang politisi di masing-masing daerah pemilihan tidak otomatis terpilih menjadi pimpinan dewan. Pertimbangan loyalitas, dedikasi terhadap partai menjadi tiket utama yang harus dimiliki oleh kader untuk diutus sebagai pimpinan di parlemen. (Wawancara personal dengan AL, 15/7/2019).

Kriteria berikutnya adalah kader yang memiliki peluang untuk dijadikan sebagai pimpinan parlemen dari PDI Perjuangan minimal harus pernah menjadi anggota legislator di periode sebelumnya. Artinya, seseorang yang sebelumnya berstatus *incumbent* di parlemen—meskipun menjadi anggota biasa di parlemen dan bukan berstatus pengurus partai—memiliki potensi untuk diutus menjadi pimpinan dewan.

Terakhir, syarat ketiga yang menjadi catatan Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan dalam menempatkan kadernya di jabatan pimpinan parlemen dengan mempertimbangkan jajaran pengurus partai yang pernah duduk di kursi pimpinan dewan. Syarat yang paling akhir disebutkan ini merupakan sebuah tiket khusus bagi politisi senior yang pernah menjabat dalam stuktur pimpinan parlemen di periode sebelumnya. Dan, menurut Djarot, bagi kadernya yang pernah menjadi pimpinan di dewan perwakilan rakyat tentu memiliki catatan dan nilai lebih sehingga pantas untuk diprioritaskan dalam jabatan pimpinan di lembaga parlemen.

Meskipun ketiga kriteria yang telah disebutkan tadi dimiliki oleh setiap politisi, keputusan akhir siapa yang akan ditetapkan sebagai pimpinan dewan biasanya DPP PDI Perjuangan akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) di kalangan internal partai. Setelah melalui tahap ini maka ditetapkanlah kader yang akan dipercaya untuk memimpin parlemen.

Sebagai bahan diskusi awal, perlu disampaikan bagaimana struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan masa bakti 2019-2024 di Kabupaten Bangka Tengah. Ini penting dilakukan mengingat peluang kader dari partai yang berlogo “moncong putih” dalam memimpin parlemen berbasis kepengurusan di internal partai tersebut. Hasil dari Konferensi Cabang internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan untuk Kabupaten Bangka Tengah yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Juni 2019 yang lalu menempatkan Korari sebagai ketua, Syamsu Hairil sebagai sekretaris dan Habibullah dipercaya untuk menjadi Bendahara (Antara News Bangka Belitung, 30/6/2019).

Jika melihat fakta terkini di Bangka Belitung—yang kemudian dicocokkan dengan syarat pemilihan pimpinan di parlemen lokal—maka politisi perempuan seperti Me Hoa tidak memiliki peluang dalam menduduki jabatan ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bangka Tengah masa bakti 2019-2024. Berdasarkan musyawarah internal PDI Perjuangan yang baru saja berlangsung, dominasi politisi laki-laki dalam struktur partai begitu kokoh. Potret ini tentu saja menjadi catatan khusus bagi dunia perpolitikan di Indonesia yang fokus pada kajian keterwakilan perempuan dalam berbagai elemen ruang publik, termasuk kepengurusan di partai politik. Tidak adanya keterwakilan perempuan dalam jabatan politik strategis di partai politik tentu saja semakin menutup peluang bagi politisi perempuan yang berkiprah dalam dunia politik untuk menduduki jabatan strategis di parlemen. Mekanisme pemilihan kader partai politik dalam mengemban amanah pimpinan di parlemen lokal mengandalkan status kepengurusan di internal partai seperti yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini. Jika ini konsisten

dilakukan, maka sehebat apapun kiprah politisi perempuan dalam mewarnai dinamika proses kebijakan publik di Indonesia pada akhirnya masih termarginalkan.

Untuk memastikan adanya komitmen partai politik dalam mengutus kadernya dari kalangan perempuan sebagai pimpinan di lembaga legislatif daerah—penulis melakukan wawancara dengan seorang politisi perempuan senior, yang secara subyektif penulis anggap cukup potensial untuk ditempatkan pada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Kabupaten Bangka Tengah yakni Me Hoa¹³ dan mengumpulkan

pernyataan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bangka Belitung¹⁴—perlu dilakukan pengamatan yang mendalam berdasarkan pengalaman yang terjadi di Bangka Belitung.

Dari hasil penelusuran tersebut dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, secara pribadi Me Hoa cukup siap ketika nanti dipercaya oleh partainya untuk memimpin institusi legislator di Bangka Tengah. Adapun alasan dari kesiapan tersebut karena berdasarkan dari pengalaman selama 10 tahun menjadi ketua komisi (Wawancara Personal). Selain itu, Me Hoa juga begitu aktif di luar parlemen seperti menjadi pengurus penting di Pemuda Khatolik Bangka Belitung. Bahkan, Me Hoa juga hampir setiap minggu melakukan senam pagi bersama kalangan “*emak-emak*” di halaman

¹³ Seperti yang telah disebutkan di bagian sebelumnya, Me Hoa merupakan politisi peraih suara terbanyak di daerah pemilihannya yakni Bangka Tengah 2 yang meliputi Kecamatan Pangkalan Baru dan Kecamatan Namang dengan angka yang cukup fantastis: 2.885 suara. Perolehan suara yang dicapai oleh Me Hoa ini merupakan angka tertinggi se Kabupaten Bangka Tengah. Selain itu, Me Hoa juga berstatus incumbent, yakni menjadi ketua komisi selama dua periode masa bakti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (periode 2009-2014 dan periode 2014-2019). Sayangnya, hasil Konferensi Daerah (Konferda) dan Konferensi Cabang (Konfercab) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan se-provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2019-2024, Me Hoa tidak tercatat sebagai kepengurusan di posisi strategis seperti Ketua, Sekretaris, Bendahara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kabupaten Bangka Tengah. Hasil Konferensi Cabang tersebut untuk Kabupaten Bangka Tengah menempatkan Korari sebagai ketua, Syamsu Hairil sebagai sekretaris dan Habibullah dipercaya untuk menjadi Bendahara (Antara News Bangka Belitung, 30/6/2019).

¹⁴ Didit Srigusjaya adalah politisi senior yang dibesarkan dan membesarkan PDI Perjuangan. Saat ini tercatat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk masa kerja 2019-2024. Hasil Pemilu Legislatif 2019 yang lalu, Didit kembali mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Daerah Pemilihan Kabupaten Bangka Tengah. Hasilnya cukup memuaskan. Didit kembali terpilih dengan perolehan suara personal sebanyak 15.675 dari total suara PDI Perjuangan sebesar 26.845 di Bangka Tengah (Wow Babel, 13/5/2019). Pada Konferda 2019 kali ini, Didit kembali dipercaya untuk menjadi ketua DPD PDI Perjuangan Bangka Belitung selama lima tahun mendatang (2019-2024).

rumahnya secara massal. Berdasarkan pengakuan inilah kemudian Me Hoa merasa siap untuk diutus sebagai pimpinan legislator di masa mendatang selain karena alasan dari keharusan serta kesigapan seorang kader partai ketika diberi tugas untuk mengemban amanah yang dipercaya oleh institusinya.

Kedua, Me Hoa juga merupakan politisi petahana. Artinya, dengan merujuk kriteria utama sebagai ketua parlemen dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan harus memiliki pengalaman sebagai anggota legislator di periode sebelumnya. Dengan bermodalkan pengalaman di parlemen selama 10 tahun terakhir tentu saja menempatkan Me Hoa sebagai kader potensial untuk dijadikan sebagai pimpinan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten nanti.

Ketiga, meskipun Me Hoa tidak terpilih sebagai struktur Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB) di PDI Perjuangan hasil konferensi cabang masa bakti 2019-2024, terkait dengan peluang Me Hoa sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Didit mengakui bahwa

harapan itu masih ada. Menurut Didit, meskipun konfercab dan struktur organisasi Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Bangka Tengah sudah berubah penentuan siapa yang dipilih menjadi ketua parlemen lokal di Bangka Tengah mengacu pada struktur organisasi periode sebelumnya (Antara News Bangka Belitung, 4/7/2019). Menurut Didit, jika mengacu pada SK organisasi periode sebelumnya maka yang memiliki peluang untuk menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah adalah Edi Purwanto, Indra Gunawan dan Me Hoa.

Pernyataan ini tentu saja menjadi kabar baik bagi politisi perempuan seperti Me Hoa yang memang potensial untuk dijadikan sebagai ketua di lembaga legislatif. Hanya saja, menurut pengakuan Didit, kesepakatan ini masih saja bisa berubah jika ada sikap dan kebijakan langsung dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sekiranya Dewan Pimpinan Pusat memutuskan kehendak lain maka kepengurusan di daerah harus mematuhi sikap tersebut karena secara organisatoris harus taat terhadap aturan organisasi (Antara News Bangka

Belitung, 4/7/2019). Dari berbagai syarat untuk menjadi pimpinan parlemen yang mengikuti tradisi internal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sayangnya belum memberikan ketegasan khusus untuk memprioritaskan keterwakilan perempuan dalam pimpinan parlemen yang dimenangkan oleh partai yang lebih dikenal dengan istilah "*partai wong cilik*". Artinya, komitmen partai politik modern seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun belum terlalu mempertimbangkan keberadaan perempuan dalam jabatan-jabatan politik strategis di parlemen.

Kesimpulan

Keterbatasan bagi perempuan terlihat nyata pada penempatan komposisi pimpinan di parlemen yang nihil kehadiran perempuan di Bangka Belitung. Berdasarkan komposisi pimpinan parlemen lokal yang ada di Bangka Belitung dalam 10 tahun terakhir menegaskan posisi perempuan yang masih memperhatikan. Fenomena ini tidak terlepas dari kondisi lapangan bagaimana ketika terpilih sebagai legislator maka perempuan ditempatkan pada posisi sebagai anggota biasa saja.

Belajar dari pengalaman selama ini tidak ada rintangan hukum formal yang menghalangi perempuan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Meskipun demikian jumlah perempuan yang memegang jabatan-jabatan politik di parlemen masih tetap rendah. Oleh karenanya diskusi mengenai pentingnya politik keterwakilan perempuan di pimpinan parlemen harus dijadikan evaluasi bagi semua pihak di masa mendatang untuk mengurangi ketimpangan gender dalam kepemimpinan di berbagai arena politik. Melalui kebijakan afirmasi dari hulu hingga hilirisasi diharapkan menjadi sebuah langkah penting untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam pimpinan parlemen di masa mendatang sebagai wujud mengurangi ketimpangan gender dalam komposisi pimpinan parlemen.

Referensi

- Idi, Abdullah (2009). *Asimiliasi Cina-Melayu Di Bangka*, Yogyakarta, Tiara Wacana.
- Heidhues, Mary F. Somers (1992). *Bangka Tin and Mentok Pepper (Terjemahan)*, Jakarta, Yayasan Nabil.

Phillips, Anne (1999). *Engendering Democracy*. Cambridge: Polity Press.

Wulandari, Lia. Dkk (2013). *Pencomotan Perempuan Untuk Daftar Calon: Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota untuk Memenuhi Kuota 30% Perempuan dalam Pemilu 2014*. Jakarta: Yayasan Perludem

Young, Iris Marion (1990). *Justice and the Political Difference*. Princeton: Princeton University Press.

Shvedova, Nadezhda (2002). “Kendala-kendala terhadap Partisipasi Perempuan dalam Parlemen”, dalam Julie Belington et. al. *Perempuan di Parlemen Bukan Sekedar Jumlah*. IDEA, Jakarta (edisi terjemahan)

Dokumen

BPS Bangka Barat Dalam Angka 2017

BPS Bangka Dalam Angka 2017

BPS Pangkalpinang Dalam Angka 2017

BPS Bangka Tengah Dalam Angka 2017

BPS Bangka Selatan Dalam Angka 2017

BPS Belitung Dalam Angka 2017

BPS Belitung Timur Dalam Angka 2017

Hasil Penelitian

Lingkaran Survei Indonesia (2008). *Faktro Etnis dalam Pilkada*, Edisi 09, Jakarta

Media Massa

Antara News Bangka Belitung,
4/7/2019: “*Tiga Kader PDIP
berpeluang jabat Ketua DPRD Bangka
Tengah*”

Antara News Bangka Belitung,
30/6/2019: “*PDIP Babel gelar
Konferda dan Konfercab 2019*”

Wow Babel, 13/5/2019: “*PDIP
Sumbang Dua Kursi di Bangka Tengah*”